



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : DEPARTEMEN AUDIT INTERN

I. DATA PRIBADI

- Nama** : FERRY BEHALKER TAMPUBOLON
- Jabatan** : KEPALA DEPARTEMEN
- NHK** : 260819

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.469.924.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 187 m2/103 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 819.924.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 89 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
3. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000		
4. Tanah Seluas 10270 m2 di KAB / KOTA JEMBRANA, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000		
5. Tanah Seluas 194 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	975.000.000
1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA CAMRY PENUMPANG Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 675.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.207.380.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	12.576.395.353
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	770.306.888
F. HARTA LAINNYA	Rp.	2.510.000.000
Sub Total	Rp.	20.509.006.241



III. HUTANG

Rp. 471.826.027

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 20.037.180.214

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.